

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin Ilmar. 2022. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Medpress Digital, Yogyakarta.
- Anton M Moeliono, dkk. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Arifin Abdulrahman. 2001. *Indikator Pengawasan*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum* .CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bibit S Rianto dan Nurlis E Meuko. 2009. *Koruptor Go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Penerbit Hikmah, Jakarta.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata, Jakarta.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Intrans Publishing, Malang.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas Media, Yogyakarta.
- Emie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media, Jakarta.
- Eni Yulianda Darwis dan Lamunan Bahara. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ermansyah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ester Arlin K, dkk. 2020. *Penyusunan Dewan Pengawas KPK dan Harapan Penunjukkan Tokoh Terpercaya*. Tempo Publishing, Jakarta .
- Feri Amsari, dkk. 2022. *Catatan Masyarakat Sipil Korupsi Politik, Pelemahan KPK, Korupsi Sumber Daya Alam, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Transparency International Indonesia, Jakarta.
- George R Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Handoko Tani T. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat, Bandung
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- HB Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1983. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. West Publishing, ST.Paul.
- Ichsan Anwary. 2018. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Imam Anshori Shaleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press, Malang.
- Indriyanto Seno Adji, dkk. 2016. *Pengujian Publik (Public Riview) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan , Jakarta.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. PT Alumni Bandung, Bandung.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- _____. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Kurnia Ramadhana dan Alvin Nicola. 2020. *Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi Pantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023*, Indonesia Corruption Watch dan Transparency International, Jakarta.

- Mahmuddin Muslim. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK), Jakarta.
- M Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Management*. University Press , Yogyakarta.
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty , Yogyakarta.
- Nurul Huda. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- R Widyo Purnomo. 2016. *Pemberantasan Kourpsi dan Pidana Lainnya*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondang P Siagian. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- SP Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syofyan Syafri Harahap. 2002. *Teori Akuntansi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Victor M Situmorang dan Jusuf Jahir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Aparatur Lingkungan Aparatur Pemerintah*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Karya Ilmiah

Adri Fernando Roleh. 2017. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 5. No. 10 .

Agus Ananda Soejoto, dkk. 2019. Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Dekrit*, Vol. 9. No. 2

Agus Suntoro. 2020. Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17. No. 1.

Ahmad Nasrudin Yahya. 2019. Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman. *Kompas Edisi Desember*.

Andi Rachmad. 2016. Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No. 2.

Andita Putri Nabila. 2021. Kedudukan Serta Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Maksigama*, Vol. 15. No. 2.

Cris Septiani. 2021. Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Jurist Diction*. Vol. 4. No. 2.

Dalinama Telaumbanua. 2020. Restriktif Status Dewan Pengawas KPK. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8 No. 1.

Fadli. Gelombang Aksi Protes atas Aksi Pembuatan Produk Hukum Bermasalah. *Catatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Fakhri Maulidi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Persepektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25. No. 15.

- Farruq Azzam Fadholi, dkk. 2022. Kedudukan Dewan Pengawas KPK terhadap Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Simbur Cahaya*, Vol. 29. No. 2.
- Iqbal Maulana dan Mas Anienda Tien Fitriyah. 2023. Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol.3. No. 1.
- Ismail. 2013. Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 01. No. 2.
- Jessica Maria Sarah Senduk, dkk. 2022. Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 11. No. 1.
- Karman Jaya, dkk. 2021. Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi. *Al-Qodau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1.
- Kartika S Wahyuningrum, dkk. 2020. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Setya Wacana*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Piagam Jakarta Prinsip Untuk Lembaga Anti Korupsi. *Komitmen Indonesia pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G-20 Anti Corruption Working Group (ACWG)*, November 2012.
- Maharani Wicahyaningtiyas. 2022. Controlling dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al Hadist. *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 6. No. 1.
- Mei Susanto. 2018. Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas*, Vol. 4. No. 2.
- Neny Fathyatul Hikmah. 2020. Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, Vol. 2. No. 2.
- Oktavia Wulandari, dkk. 2020. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Resarch*, Vol. 2. No. 3.

- Olivia Umar. 2020. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 26. No. 14.
- Oly Viana Agustine, dkk. 2019. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16. No. 2.
- Phillipus M Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, No. 5-6 .
- Rapat Paripurna Ke-9 Tahun 2019 di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II Kompleks DPR/MPR. 2019. Perbandingan UU KPK Sebelum dan Sesudah Perubahan. *Cita Law Series*.
- Surrahmad, dkk. 2020. Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Lex Jurnalica*. Vol. 17. No. 3. Depok
- Taufik Halim Pranata dan Zarkasi. 2021. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago Journal of Constitutional Law*, Vol.1. No. 2.
- Tigor Einstein. 2020. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *NJL*. Vol. 3. No. 2.
- Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra. 2014. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxilliary Institutions). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No.5.
- Totok Sugiarto. 2013. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18. No. 1.
- Ujang Chandra S. 2012. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 27. No. 2.
- Wana Alamsyah. 2020. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2022. *Indonesia Corruption Watch, Divisi Hukum Monitoring Pengadilan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4150.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 19 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 11 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas.

D. Website

<https://tirto.id/icw-dewan-kpk-rawan-kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapan-eict>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917014539-431075/poin-poin-revisi-uu-kpk-yang-disepakati-dpr-dan-pemerintah>

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi.pengawas.internal-dan-pengaduan-masyarakat>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911180426-12-49585/yusril-sebut-kpk-perlu-dewan-pengawas>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01319127//menimbang-urgensi-dewan-pengawas-kpk?page=2>

<https://hukumonline.com/berita/baca/It56b9d64245b97/dua-professor-hukum-pidana-beda-pandangan-so'al-dewan-pengawas-kpk/>

<https://hukumonline.com/beritabaca/It5978689/disepakati-penyadapan-harus-mendapat-izin-pengadilan/>

<https://antikorupsi.org>

<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06survey-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-cenderung-menurun>